

PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI BANTEN

Seruni Mustika Dewi

serunimustika809@gmail.com Akuntansi, Universitas Serang Raya

Denny Kurnia

adennyrahmadhiya@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya

Entis Haryadi

Entisharyadi75@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan efisiensi biaya pemungutan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan sampel realisasi pendapatan pajak daerah di Provinsi Banten. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis dan model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah di Provinsi Banten secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Bagian dari pendapatan daerah yang memiliki peranan penting adalah pajak daerah. Pemerintah daerah hendaknya dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan yang potensial terutama dari pajak daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaannya tidak akan efektif dan efisien serta ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena pajak daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal (Handoko, 2013). Wilayah Banten adalah salah satu wilayah yang memiliki daerah perindustrian dan perekonomian yang cukup besar. Sehingga sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan menggali sumber penerimaan daerah tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya, serta kemampuan menekan biaya yang

dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan menambah penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya mulai daritahun 2014 sampai dengan 2017 di wilayahBanten meliputi Kota dan Kabupaten, pendapatan asli daerah yang dihasilkan bersumber dari pajak daerah mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut masih sedikit diatas ambang batas anggaran. Selain itu, berdasarkan data diatas,peningkatan pendapatan yang berasal dari pajak daerah setiap tahunnya hanya sedikit melebihi anggaran, ini berarti pemerintah hanya menggunakan anggaran tersebut hanya berdasarkan target yang harus dicapai sehingga peningkatan pendapatan yang berasal dari pajak daerah kurang dimaksimalkan. Semestinya pemerintah lebih bisa memaksimalkan anggaran tersebut dalam pemungutan pajak agar penerimaan pendapatan asli daerah jauh lebih baik lagi. Selain itu, peningkatan yang hanya sedikit diatas anggaran dapatmengakibatkan timbulnya pertanyaan dari kalangan masyarakat, hal itu terjadi karenaanggaran yang telah dihabiskan hanyamampu direalisasikan sedikit lebih tinggi dari anggran dan dampaknya tingkat kepercayaan masayrakat akan menurun terhadap kinerja pemerintah.

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan utama dari pemerintahan, sehingga anggaran dan biaya yang dikeluarkan dalam memungut pajak harus bisa efektif dan efesien. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif (Halim dan Kusufi, 2014). Sedangkan Efisiensi adalah ukuran terhadap biaya atas *output* yang mana mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan *output* (Mahmudi, 2007). Tingkat efektivitas pajak daerah di wilayah Banten selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat. Efektivitas pajak daerah yang berfluktuasi mengakibatkan kondisi pendapatan asli daerah akan terganggu, mungkin saja kondisi tersebut akan mengurangi pendapatan yang akan diterima pemerintah setiap tahunnya. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan Septiani Hanipa dan Dudi Pratomo (2015) menyatakan bahwa efektivitas pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dan juga Febri Adhi Nugroho (2011) menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup baik, yangartinya bahwa pajak dapat mempengaruhi Pendapatan Daerah dengan sangat baik, jika pajak yang dihasilkan melebihi anggaran maka secara langsung pendapatan asli daerah menjadi meningkat.

Tingkat efisiensi pajak daerah di wilayah Banten selama empat tahun terakhir

mengalami fluktuasi, namun cenderung meningkat. Efisiensi pajak daerah yang berfluktuasi mengakibatkan kondisi pendapatan asli daerah akan terganggu, mungkin saja kondisi tersebut akan mengurangi kinerja dari instansi terkait dan hasilnya kondisi tersebut menghilangkan motivasi dari sumber daya manusia yang ada dibagian instansi tersebut dalam mengumpulkan pajak, sehingga pendapatan yang akan diterima pemerintah setiap tahunnya berkurang. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Vita Amalia Hakim (2013) yang menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah efektif dan efisien terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu juga Septiani Hanipa dan Dudi Pratomo(2015) menyatakan bahwa efisiensi pajak secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan *output*-nya (Halim dan Kusufi, 2014).

Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran terhadap biaya atas *output* yang mana mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan *output* (Mahmudi, 2007).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Mamesah (1995) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan pikiran dan sumber- sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim dan Kusufi, 2014: 36).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Asrori (2010) dalam buku Abdul Halim dan Kusufi (2014), pada umumnya pendapatan adalah penambahan ekuitas dana lancar pemerintah karena penerimaan yang berasal dari berbagai sumber, sementara Ritonga (2010) berpendapat bahwa pendapatan dalam konteks keuangan daerah adalah semua penerimaan pada bendahara umum daerah atau

bendahara penerimaan yang menambahekuitas dana lancar dalam periode tahun anggarn yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

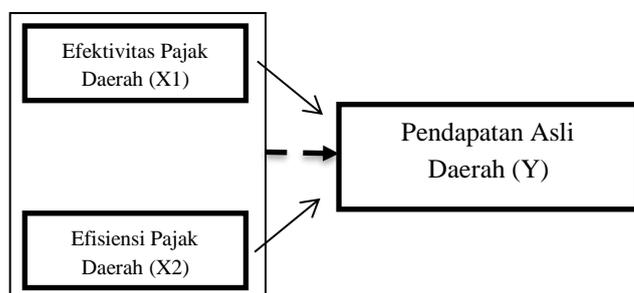
Pajak Daerah

Definisi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yangbersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikirian dirumuskan berdasarkan tinjauan teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu. Secara sederhana, kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan tersebut akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan pula, agar sumber- sumber tersebut meningkat, maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah harus optimal. Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah. sehingga dengan kata lain, bila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal, maka akan berpengaruh pula terhadap peningkatan PAD. Pemungutan pajak yang efektif dan efisien dengan mengacu pada

target dan anggaran belanja maupun biaya yang dikeluarkan serendah mungkin diharapkan akan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan meningkatnya pajak daerah, maka secara tidak langsung kontribusi dari optimalisasi penerimaan pajak daerah tersebut akan berpengaruh juga terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Menggunakan teknik pengolahan data. Penelitian dilakukan pada instansi teknis Pemerintah Provinsi Banten yang beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Albantani, Palima, Kota Serang melalui *website* resmi Pemerintah Provinsi Banten (<https://bantenprov.go.id>), Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Banten maupun *website* resmi pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://dpjk.kemenkeu.go.id>). Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukann kurang lebih 1 (satu) bulan. Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sampel Penelitian Sugiyono (2017:118) mengidentifikasi sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Karena dari pada itu untuk mendapatkan sampel yang representatif tersebut, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2017:124). Dari pertimbangan-pertimbangan itu penulis menentukan sampel penelitian dari populasi yaitu pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah yang diambil sebagai sampel penelitian adalah data anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah tingkat I (provinsi) dan pajak daerah tingkat II (kabupaten/Kota) di wilayah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran (TA) 2014 sampai dengan 2017.

Hasil Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel

Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardized		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	Coefficients		
1	(Constant)	2.656	3.379			.786	.437
	Ln_X1	1.637	.542	.564		3.020	.005
	Ln_X2	3.386	1.274	.496		2.657	.012

Berdasarkan data diatas dibentuk persamaan sebagai berikut :

$$PAD = 2,656 + 1,637 \text{ Efektivitas Pajak} + 3,386 \text{ Efisiensi Pajak} + e$$

Dari persamaan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Nilai konstanta sebesar 2,656 mempunyai arti apabila semua variabel independen sama dengan nol, maka PAD bernilai sebesar 2,656. Variabel Efektivitas Pajak (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,637, hal ini menjelaskan jika Efektivitas Pajak naik satu persen (1%) akan berakibat pada naiknya PAD sebesar 1,637, namun dengan asumsi variabel lainnya konstan. Variabel Efisiensi Pajak (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 3,386, hal ini menjelaskan jika Efisiensi Pajak naik satu persen (1%) akan berakibat pada naiknya PAD sebesar 3,386, namun dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji T

**Tabel Uji T
Coefficients^a**

Model		Unstandardized		Standardized		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	Coefficients		
1	(Constant)	2.656	3.379			.786	.437
	Ln_X 1	1.637	.542	.564		3.02	.005
	Ln_X 2	3.386	1.274	.496		2.65	.015

Berdasarkan hasil penghitungan tabel diatas menunjukkan bahwa Efektivitas Pajak menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 3,020 dengan nilai signifikan untuk variabel Efektivitas Pajak adalah 0,005. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka akan disimpulkan bahwa nilai sig $0,005 < 0,05$ dan T_{hitung} $3,020 > T_{tabel}$ $2,032$ maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Efektifitas Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penghitungan tabel diatas menunjukkan bahwa Efisiensi Pajak menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar 2,657 dengan nilai signifikan untuk variabel Efisiensi Pajak adalah 0,012. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka akan disimpulkan bahwa nilai sig $0,012 < 0,05$ dan T_{hitung} $2,657 > T_{tabel}$ $2,032$ maka dapat diartikan bahwa. Berdasarkan hasil uji F didapat f_{hitung} sebesar 5,173 dengan nilai signifikan 0,011 dan berdasarkan tabel distribusi F pada tarif 5% dengan derajat pembilang $k = 2$ dan derajat penyebut digunakan $n-k-1 = 36-2-1 = 33$, maka diperoleh f_{tabel} sebesar 3,28. Karena $f_{hitung} < f_{tabel}$ ($5,173 > 3,28$) maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Hipotesis ketiga (H_3) diterima, dimana efektivitas pajak dan efisiensi pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan

Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Banten

Berdasarkan hasil dari statistik deskriptif yang telah dilakukan, nilai rasio efektivitas pajak daerah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa nilai rasio efektivitas terbesar yaitu 224% yang tergolong sangat efektif, sedangkan nilai rasio efektivitas terkecil yaitu sebesar 91.24% dan tergolong efektif, rata-rata nilai rasio efektivitas pajak daerah dari tahun 2014-2017 sebesar 124,32% dan tergolong sangat efektif berdasarkan kriteria efektivitas pajak daerah Kepmendagri No. 690.900.327. Dengan demikian $H_0 : p \leq 90\%$ ditolak dan $H_1 : p > 90\%$ diterima maka H_1 dapat diterima dimana efektivitas pajak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Banten

Berdasarkan hasil dari statistik deskriptif yang telah dilakukan, nilai rasio efisiensi pajak daerah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa nilai rasio efisiensi terbesar yaitu 3,29 %, sedangkan rasio efisiensi terkecil sebesar 1.24% dan rata-rata rasio efisiensi pajak dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sebesar 2.50% sehingga dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pajak daerah selama 2014-2017 memiliki nilai kurang dari 3% dan termasuk kedalam kategori efisien. Dengan demikian $H_0 : p \leq 3\%$ ditolak dan $H_1 : p > 3\%$ diterima maka H_2 dapat diterima dimana efisiensi pajak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah terhadap PAD

Berdasarkan hasil Uji T yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Efektivitas Pajak menghasilkan nilai sig $0,005 < 0,05$ dan $T_{hitung} 3,020 > T_{tabel} 2,032$ maka dapat diartikan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Efektivitas Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ini dikarenakan semakin baiknya pemerintah daerah dalam menggunakan biaya anggaran dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan penerimaan pajak daerah yang ditentukan, sehingga hasil pajak yang telah dikumpulkan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil Uji T yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Efektivitas Pajak menghasilkan nilai sig $0,012 < 0,05$ dan $T_{hitung} 2,657 > T_{tabel} 2,032$ maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Efisiensi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ini dikarenakan pemerintah daerah telah sangat memaksimalkan biaya yang telah dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak sebanyak mungkin, sehingga banyaknya jumlah pajak yang diperoleh akan memberikan tambahan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil uji F diatas menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pajak secara bersama-sama menghasilkan nilai sig $0,011 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel} (5,173 > F_{tabel} 3,28)$ maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Efisiensi Pajak dan efisiensi pajak secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena pada dasarnya jika pemerintah berhasil melakukan efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran dan biaya pada pemungutan pajak maka efisiensi dan efektivitas akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, Rasio efektivitas penerimaan

pajak di Provinsi Banten termasuk ke dalam kriteria sangat efektif. Hal ini ditunjukkan oleh hasil rata-rata dari perhitungan rasio yang berada di atas 100%, dengan rata-rata rasio 124,32% yang mana realisasi penerimaan pajak daerah lebih tinggi dari target penerimaan pajak daerah. Berdasarkan tingkat realisasi pada tahun anggaran 2014-2017. menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten melalui instansi pemungut pajak yang dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten telah berhasil dalam mengotimalkan pendapatan asli daerah. Tingkat efisiensi pemungutan pajak di Provinsi Banten telah berjalan efisien. Hal ini ditunjukkan dengan biaya atau anggaran belanja dalam merealisasikan pajak daerah instansi terkait yang dibebankan dalam tahun bersangkutan tidak melebihi angka 3% seperti apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Efektivitas dan Efisiensi Pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena pada dasarnya jika pemerintahan daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pajak sehingga pajak yang dikumpulkan semakin membaik maka akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena pajak merupakan salah satu bagian utama yang membantu pemerintah dalam mendapatkan pendapatan, sehingga jika semakin baiknya tingkat efektivitas dan efisiensi yang dilakukan pemerintah, hal itu akan membuat peningkatan dalam pendapatan asli daerah dan memperkecil biaya anggaran ataupun biaya belanja daerah. Efektivitas dan efisiensi pendapatan pajak daerah di Provinsi Banten secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saran

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten, terutama dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten lebih meningkat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut : Pajak daerah merupakan komponen utama yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pajak daerah harus ditingkatkan kembali. Persentase kenaikan pajak daerah bukan solusi yang tepat untuk meningkatkan jumlah pendapatan, karena kenaikan tarif pajak daerah akan memberatkan wajib pajak dan mematikan sektor ekonomi. Jumlah pendapatan dari pajak daerah dapat ditingkatkan dengan cara pengawasan terhadap pemungutan pajak yang lebih baik. Instansi pemungut pajak baik pada Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten perlu menyempurnakan sistem kerja baik organisasi maupun administrasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan

yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan (*good governance*). Pemerintah Provinsi Banten perlu mengusulkan rancangan regulasi hukum tentang pajak daerah yang baru dan apabila sudah disahkan menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda), pemerintah wajib untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat tentang pentingnya arti sumber-sumber dana pembangunan bagi kemajuan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Enggar, D, P. Rahayu, Sri. Wahyudi, I. (2011). “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi)*”. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Vol.13 No.(1). h.69-82. ISSN : 0852- 8349
- Adhiantoro, Hony. (2013). “*Aalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapata Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011)*”. Yogyakarta. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta
- Bahri, M. Samsul. (2011). “*Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Derah Kota Surakarta tahun 2004-2009*”. *Skripsi*. Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak Diterbitkan
- Ghazali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hakim, Vita Amaliah. (2013). “*Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*”. *Skripsi*. Pada Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Tidak Diterbitkan
- Halim, Abdul dan Kusufi. (2014). “*Akuntansi Sektor Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*”. Jakarta. Salemba Empat
- Halim, Abdul. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta. Salemba Empat
- Hanipah, Septian. Pratomo, Dodi. (2015). “*Pengaruh Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Bandung 2009-2011)*”. *E-Proceeding of Management Universitas Telkom*. Vol.2. No.(3). 3274-3286. ISSN : 2355-9357
- KS, Lazyra. (2016). “*Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam menilai Kinerja*

- Keuangan Pemerintah Kota Medan*". Medan. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Lohonauman, Indriani Luisa (2016). "*Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro*". *Jurnal EMBA*. Vol. 1. No.(1). H. 172-180. ISSN : 2303-1174
- Memah, Edward M. (2013). "*Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado*". *Jurnal EMBA*. Vol. 1.No.(1). H. 871-881. ISSN : 2303-1174
- Nugroho, Febri Adhi. (2011). "*Analisis Tingkat Efektivitas dalam Pemungutan Pajak Daerah serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Studi Kabupaten Wonogiri)*". Skripsi.Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak Diterbitkan
- Purna, Junius Nanda. (2012). "*Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2002-2011*". Skripsi. Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidak Diterbitkan
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. (2014). "*Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*". Skripsi. Pada Universitas Diponegoro Semarang. Tidak Diterbitkan
- Rinto, Jantje dan Novi. (2015). "*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*". *Jurnal EMBA* Vol. 3 No.4. h. 23 – 32
- Roland, David dan Lidia. (2016). "*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara*". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16. No. 4
- Rukayah, Nugrahini dan Raden. (2017). "*Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*". *Jurnal Akuntansi* Vol.4 No.2
- Sekaran, Uma. (2016). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta. Salemba Empat
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sumenge, Ariel Sharon. (2013). "*Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*". *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3

Suartana, I Wayan dan Yaneka Julastiana. “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung*”. Bali. Jurnal Ekonomi Universitas Udayana

Yoduke, Ryfal. Ayem, Sri. (2015) “*Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014*”. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3. No.(2). ISSN : 2088-768X

_____, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

_____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah